

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)
e-ISSN : 2502-8537 (Online)

KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP: STRATEGI UNTUK KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN

(PARTNERSHIP IN THE FISHERY SECTOR: STRATEGIES FOR BUSINESS AND EMPLOYMENT SUSTAINABILITY)

Devi Asiati dan Nawawi

Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Korespondensi penulis : *deviasiasi@gmail.com*

Abstract

Partnership and empowerment development of fishermen community is one way that can be taken to ensure the continuity of business and employment in the fishery sector. This attempt also promotes the improvement of social and economic condition of fishermen community through income enhancement and property alleviation, reduces fisherman's dependency on traditional capital institution, and achieves more equitable and sustainable development. This paper aims to review the concept of partnership and empowerment of workers in the fishery sector and to analyze alternative policy strategies of fishermen's partnership and employment through strengthening the internal aspect (institutional approach) and the external aspects (infrastructure and capacity support). The analyzed data derived from field research in Tegal and Cilacap, Central Java in 2013 and 2014. This paper confirms that the synergy between the government, fishermen, and business has a very important role in supporting the successful implementation of the partnership program and the empowerment of fishermen. Furthermore, it is important to establish and improve capabilities of fishermen group in local level, to supervise and monitor the implementation of activities involving all fisheries' stakeholders, and to establish strategic policies that support fishermen's autonomy in fisheries equipment ownership, the business capital, marketing network, and production process.

Keywords: *Partnership, Empowerment, Fisherman, Business and Employment Continuity*

Abstrak

Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Upaya tersebut juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan yang lebih luas, melepas ketergantungan nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional, serta sarana mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk mereview konsep kemitraan dan pemberdayaan tenaga kerja di sektor perikanan dan menganalisis alternatif strategi kebijakan melalui penguatan aspek internal (pendekatan kelembagaan) dan aspek eksternal (kelengkapan infrastruktur dan daya dukung). Menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari penelitian lapangan di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun 2013-2014. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan nelayan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapabilitas organisasi kelompok nelayan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kelembagaan kenelayanan, dan pelaksanaan strategi kebijakan dan program yang sarannya mencakup pencapaian kemandirian kelompok nelayan terhadap kepemilikan peralatan tangkap, permodalan usaha, pemasaran hasil, dan pengolahan hasil produksi.

Kata Kunci: Kemitraan, Pemberdayaan, Nelayan, Kelangsungan Pekerjaan dan Usaha

PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan Indonesia tidak berhenti pada permasalahan klasik ketenagakerjaan, yaitu tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang masih tinggi, namun permasalahan juga dialami oleh dunia usaha. Produktivitas tenaga kerja masih tergolong rendah sementara pengembangan usaha yang semakin kompetitif dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan daya saing dan ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi yang lebih baik. Tantangan ketenagakerjaan ini semakin berat mengingat sebagian besar usaha di Indonesia merupakan usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada semua skala sektor ekonomi, mulai usaha skala besar, menengah, hingga skala kecil.

Hingga saat ini telah banyak program terkait pemberdayaan dan kemandirian ekonomi terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengeluarkan kelompok masyarakat tersebut dari kemiskinan, agar semakin berdaya, dan mandiri secara ekonomi untuk siap bersaing dengan kekuatan ekonomi di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Namun demikian berbagai program tersebut banyak menuai kritik terutama dari aspek target sasaran dan keberhasilannya. Keberhasilannya semakin dipertanyakan ketika hasil akhir dari pelaksanaan program pemberdayaan bukan menciptakan kemandirian melainkan ketergantungan yang semakin tinggi, misalnya terhadap bantuan pemerintah (Manahan, 2009). Pada banyak kasus, program pemberdayaan tidak berkesinambungan, yaitu berhenti setelah pelaksanaan program dinyatakan selesai (Nawawi, 2013). Ini artinya ada banyak kesalahan dan kelemahan dari berbagai program pemberdayaan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah dan sekaligus diperlukan adanya perbaikan (Darwin, 2003).

Berdasar konsep pembangunan yang berkembang saat ini, kemitraan dan pemberdayaan merupakan model pembangunan yang banyak mendapat perhatian. Kemitraan dan pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah konsep terpisah walaupun dalam praktiknya dapat saling melengkapi. Pada pola yang sederhana, keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan dapat dilihat pada berbagai

implementasi kebijakan pemerintah khususnya terkait peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok petani, nelayan dan pekerja informal.

Keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan dapat juga dilihat dari definisi kedua konsep tersebut yang intinya adalah sama, yakni membangun kepercayaan, menciptakan kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan. Kemitraan merupakan suatu bentuk hubungan kerja yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berbagi komitmen untuk mencapai tujuan dengan menggabungkan sumber daya dan mengkoordinasi kegiatan bersama. Kemitraan hanya dapat terbentuk apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya telah memiliki kesepakatan. Konsep kemitraan itu sendiri mengandung proses membangun kepercayaan, pemecahan masalah bersama dan mengelola hubungan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya (Sukada dkk, 2007).

Sementara pemberdayaan dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana (fisik dan sosial) serta kelembagaan, dan perlindungan atau pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidakimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dalam hal ini, kemitraan dan pemberdayaan merupakan suatu strategi yang tepat dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sumodiningrat, 2007).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep kemitraan dan pemberdayaan tenaga kerja untuk kelangsungan pekerjaan, serta memberikan alternatif strategi kebijakan terkait dengan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Data yang digunakan berasal dari hasil penelitian pada masyarakat nelayan di Kota Tegal dan Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013 – 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara deskriptif.

KONSEP DAN KEBIJAKAN TERKAIT KEMITRAAN

Dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan atau "*partnership*" mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bersinergis dan bersifat sukarela atas dasar saling memerlukan, saling

memperkuat, saling menguntungkan. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang dirugikan, masing-masing pihak yang bermitra akan mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Kemitraan usaha adalah hubungan antar pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis (Kartasismita, 1996). Dengan kata lain, kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama pelaku usaha yang sejajar, terutama dalam pengambilan keputusan, dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha kecil dimulai sejak dicanangkannya Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996 di Jimbaran, yaitu menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang menjadikan kemitraan usaha sebagai program untuk mengembangkan usaha kecil sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Gerakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil, menengah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta skala besar. Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk menghindarkan praktek monopoli oleh perusahaan besar dengan cara mengajak perusahaan besar melakukan kemitraan bersama koperasi atau usaha kecil dan menengah. Bagi usaha kecil, kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan usaha besar merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan usaha. Bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun usaha besar tidak hanya terbatas pada modal usaha tetapi penyuluhan maupun bimbingan dan pemasaran hasil produk.

Kebijakan pemerintah terkait kemitraan usaha diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Definisi kemitraan menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar. Pada dasarnya, usaha besar dan menengah, memiliki kelebihan dalam hal permodalan, teknologi dan pemasaran dibandingkan usaha kecil.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, butir 4 bahwa : Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa dalam kemitraan mencakup pemberdayaan terhadap usaha kecil melalui proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Pemberdayaan usaha juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi dan pengendalian.

KONSEP DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan berbagai upaya memperkuat posisi seseorang melalui penumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Melalui pemberdayaan akan memperkuat individu, kelompok atau masyarakat tertentu dalam berpartisipasi, mengontrol, dan memengaruhi lembaga yang akan berdampak terhadap kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa seseorang dapat memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan orang lain (Parsons, et al, 1994 dalam Hadi, tanpa tahun). Oleh karena itu, pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah, agar dapat memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengambil keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Hadi, tanpa tahun). Mekanisme pemberdayaan dan pengembangan usaha membutuhkan suatu lembaga atau kelompok pekerja yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki usaha sejenis, seperti kelompok petani atau nelayan. Keberadaan kelembagaan petani dan nelayan memfasilitasi mereka untuk memperoleh berbagai bentuk pemberdayaan. Peran dan keberadaan lembaga diharapkan sejalan dengan berkembangnya kebersamaan usaha.

Menurut Kartasasmita (1996), upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Long Wee (1999), mengemukakan konsep pemberdayaan yang ditujukan pada kelompok perempuan. kerangka pemikiran Long Wee menekankan empat aspek yang merupakan '*level of equality and empowerment*', yaitu: (1) Akses, (2) Penyadaran, (3) Partisipasi, dan (4) Kontrol. *Akses*, menekankan pada perlunya ketersediaan ruang atau kemudahan yang sama bagi kelompok masyarakat seperti kesetaraan akses informasi kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran dan semua pelayanan umum dan pemanfaatan fasilitas. Kesamaan akses Informasi berarti tidak ada hambatan untuk memperoleh informasi yang meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar. *Penyadaran* menekankan pada kesadaran akan pengertian perbedaan jenis kelamin dan jender, kesetaraan dalam pembagian pekerjaan dan tidak adanya dominasi satu pihak ke pihak lain sehingga memungkinkan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya *partisipasi* menekankan pada kesetaraan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan administrasi. Penekanan partisipasi pada bagaimana masyarakat diberdayakan dan peran apa yang akan dimainkan setelah menjadi bagian dari

kelompok yang diberdayakan. Menurut Sumodiningrat (1989) menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, dan tenaga ahli) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut. Sementara *aspek kontrol* menekankan pada pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan melalui penyadaran dan mobilisasi untuk mencapai kesetaraan pengawasan terhadap faktor-faktor produksi dan distribusi keuntungan. Dengan kesetaraan pengawasan, tidak perlu satu kelompok mendominasi kelompok lain, demikian pula kelompok laki-laki terhadap perempuan, kelompok yang kuat terhadap yang lemah.

Sumodiningrat (1977) mengemukakan bahwa strategi untuk memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat; (3) pemberian perlindungan dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah. Selanjutnya Suharto (2005) mengemukakan bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : (1) Pendekatan mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management, crisis intervention*; (2) Pendekatan mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya; (3) Pendekatan makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Sementara Sipahelut (2010) menyatakan bahwa pendekatan kelembagaan sebagai basis dalam kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat; (2)

meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan; (3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan 4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama.

Program pemberdayaan disektor perikanan tangkap khususnya terhadap nelayan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak terutama pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program pemberdayaan yang sudah dilakukan antara lain bantuan peralatan tangkap (alat tangkap dan mesin kapal) dan bantuan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam kepada ibu-ibu/istri nelayan untuk kegiatan ekonomi produktif. Program pemberdayaan nelayan tersebut sebagian besar berjalan tidak berkelanjutan, berhenti setelah selesai program sehingga dampak jangka panjang kurang tercapai. Berdasarkan studi Program COREMAP di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa keberlanjutan berbagai kegiatan kelompok usaha masyarakat (Pokmas) sangat berkaitan dengan kelanjutan program dan tanpa pengawasan dan pendampingan yang memadai maka keberlanjutan usaha kelompok kurang terjamin (Asiati dan Nagib, 2011). Selain itu, target dan capaian tujuan program kurang teridentifikasi secara jelas sehingga terkesan hanya menghabiskan alokasi dana untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Begitu juga evaluasi dan monitoring pasca program pemberdayaan nelayan kurang berjalan optimal.

KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN

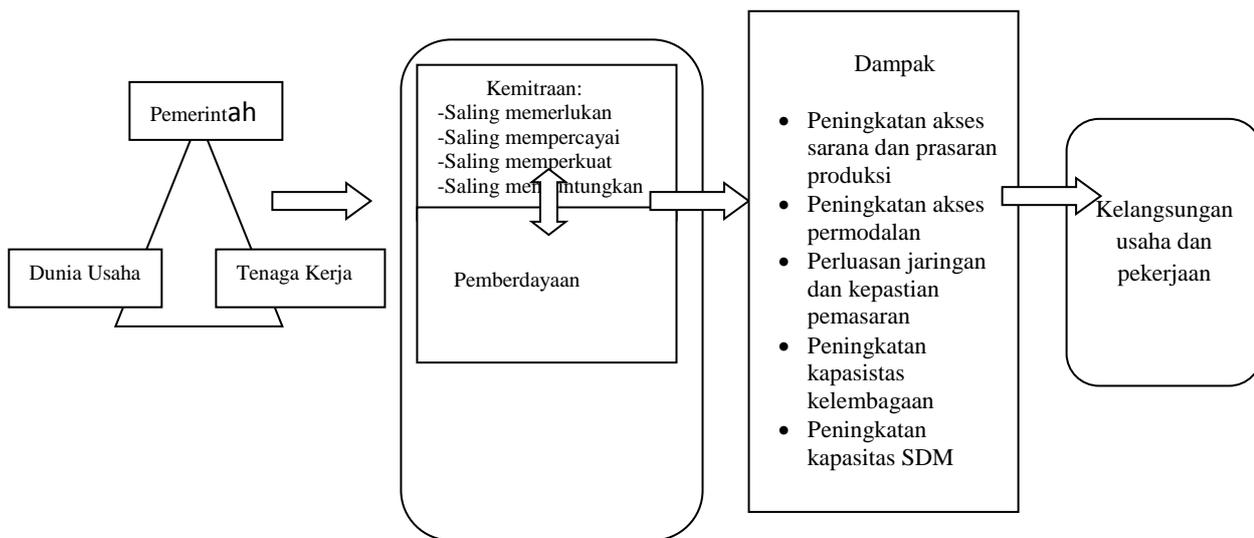
Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat tiga *stakeholder*, yaitu dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah. Masing-masing pihak berkepentingan memiliki peran dan fungsi sesuai kapasitasnya, tetapi saling membutuhkan dan integral dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional serta membuat pedoman tentang kemitraan melalui peraturan perundangan. Peran fasilitasi dari pemerintah dilakukan dengan mengupayakan penyediaan dan memfasilitasi kebutuhan modal, teknologi, maupun jaringan pemasaran dalam dan luar negeri sehingga masyarakat mempunyai peluang yang sama. Dalam hal pengawasan, pemerintah yang diwakili oleh menteri teknis bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan

sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dunia usaha sebagai salah satu stakeholder menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja. Kegiatan usaha dan produksi yang dilakukan membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Sementara tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi menyediakan jasa tenaga kerja bagi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengembangan dunia usaha yang bersifat kompetitif dalam era globalisasi memerlukan pekerja yang memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk kelanjutan usaha.

Kerjasama kemitraan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh usaha kecil untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan. Keberlangsungan pekerjaan dapat tercapai jika pemanfaatan faktor produksi, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berjalan seirama. Dalam suatu kegiatan produksi, setidaknya ada empat faktor produksi yang berpengaruh pada keberhasilan dan keberlanjutan usaha, yaitu ketersediaan bahan baku (tanah dan sumberdaya alam), tenaga kerja, modal dan teknologi. Tenaga kerja yang profesional dan memiliki produktivitas tinggi sangat diperlukan bagi kelanjutan usaha. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh pendidikan, keahlian, kemampuan, sikap dan perilaku dari para pekerja yang ada dalam suatu unit usaha. Selain produktivitas, keterampilan sangat diperlukan untuk bisa mencapai sasaran keberlangsungan kerja. Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Kelangsungan usaha dan pekerjaan melalui kemitraan dapat terjadi karena dalam kerjasama kemitraan terjadi alih teknologi, pengetahuan/keterampilan, sumberdaya manusia, cara belajar dan modal (Kamil, M, 2006).

Hubungan kemitraan yang berjalan seimbang dapat menciptakan pemberdayaan terhadap kelompok mitra sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2008 bahwa kemitraan mencakup pemberdayaan terhadap usaha kecil melalui proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Namun perbedaan kepentingan dapat berpengaruh pada terjadinya kemitraan yang berjalan tidak seimbang antar pihak yang bermitra. Dalam program kemitraan yang dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan) sering mengedepankan aspek sosial (kesejahteraan), tetapi pertimbangan keuntungan ekonomi jauh lebih dominan. Sebab misi utamanya adalah meraih keuntungan dari setiap hubungan bisnis yang tercipta. (Lopulalan, 2010).

Diagram 1.1. Hubungan Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan



Sumber: PPK-LIPI, 2014

Hasil kajian PPK-LIPI, 2014 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat lima manfaat yang dapat diperoleh usaha kecil dalam kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk kelangsungan usaha dan pekerjaan. Kelima manfaat tersebut yaitu (1) Peningkatan akses sarana dan prasarana produksi; (2) Peningkatan akses permodalan, (3) Perluasan jaringan dan kepastian pemasaran, 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan 5) Peningkatan kapasitas SDM. Terkait dengan kelima manfaat tersebut, program pemberdayaan pemerintah dan perusahaan besar/BUMN memberi akses bagi usaha kecil (tenaga kerja) untuk mendapatkan bantuan sarana dan perasarana produksi serta bantuan permodalan. Begitu juga program pelatihan dan peningkatan keterampilan memberi kesempatan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Kepastian pemasaran dimungkinkan terjadi melalui pola kemitraan dagang antara usaha besar dan usaha kecil. Program pemberdayaan oleh pemerintah biasanya diberikan melalui kelompok tenaga kerja, seperti kelompok nelayan atau kelompok tani. Mekanisme pemberdayaan melalui kelompok pekerja dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pekerja (seperti petani atau nelayan).

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional diperlukan partisipasi dan dukungan dari semua pihak. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara mulai dari dukungan dana, akses sampai kepada tataran implementasi. Sektor ketenagakerjaan sebagai lokomotif pembangunan nasional telah menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah berupa kebijakan mengatasi

pengangguran, kebijakan kemitraan untuk memberdayakan masyarakat, kebijakan perlindungan terhadap buruh dan kebijakan yang mendukung investasi. Implementasi berbagai program tersebut, tentunya membutuhkan konsep sebagai fondasi dalam menjalankan program sehingga program tersebut tepat sasaran (Nawawi, 2013). Salah satu program yang selama ini dipakai untuk mengangkat ekonomi masyarakat adalah program kemitraan. Program ini dalam implementasi membutuhkan dukungan mulai dari pemerintah, pihak swasta, kelompok masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

PROGRAM KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP

Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Selain menjadi sumber pendapatan penduduk, sektor perikanan tangkap menjadi andalan bagi masyarakat pesisir sebagai sumber mata pencaharian. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 mencatat jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor perikanan tangkap mencapai 1,85 persen (1.945.786 orang). Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2011, jumlah rumah tangga perikanan tangkap mencapai 920.129 rumah tangga, meningkat 0,86 persen dari tahun sebelumnya (KKP, 2012). Pada rumah tangga perikanan tangkap di laut mengalami peningkatan rata-rata 1,68 persen per tahun. Pertambahan jumlah nelayan tersebut juga seiring dengan pertambahan jumlah kapal penangkap ikan. Berdasarkan data FAO, peningkatan jumlah kapal nelayan mencapai 11 persen, dari 348.425 pada tahun

2007 menjadi 390.770 pada tahun 2009. Dalam kurun waktu dua dekade, peningkatan jumlah nelayan Indonesia tercatat telah mencapai dua kali lipat. Besarnya penduduk berprofesi sebagai nelayan mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pesisir terhadap potensi sumber daya laut. Kondisi ketenagakerjaan pada sektor perikanan tangkap masih didominasi oleh kelompok nelayan kecil (*small scale fishery*) atau nelayan tradisional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gross Ton (GT). Dari jumlah 2,7 juta jiwa nelayan, sebanyak 95,6 persennya merupakan nelayan tradisional yang beroperasi di sekitar pesisir pantai. Berdasarkan data KKP (2012), sebanyak 80 persen rumah tangga di sektor perikanan merupakan nelayan skala kecil yang tidak memiliki perahu atau memiliki perahu tanpa motor. Selanjutnya data FAO (2005) memperkirakan bahwa dari total 38 juta orang yang dikategorikan sebagai nelayan pada tahun 2002, sejumlah 90 persen diantaranya merupakan nelayan kecil. Jumlah tersebut akan bertambah 100 juta lagi apabila juga termasuk pekerjaan-pekerjaan lainnya (pemrosesan dan penjualan hasil tangkap). Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh nelayan (nelayan kecil) menjadikan kelompok ini identik dengan kemiskinan. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi menyatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan atau penduduk yang bergerak di sektor perikanan berada dalam kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Selanjutnya menurut Kusnadi (2004), kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor internal, berkaitan dengan kondisi internal sumberdaya nelayan dan aktifitas kerja nelayan (kemampuan modal dan alat tangkap, hubungan kerja dengan pemilik modal, gaya hidup dan sebagainya), dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berkaitan diluar diri dan aktifitas nelayan (kebijakan pemerintah, pemasaran dan sebagainya).

Nelayan merupakan pelaku utama dalam kegiatan perikanan yang memproduksi hasil perikanan melalui kegiatan penangkapan ikan di laut. Nelayan dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan alat tangkap ikan, yaitu 1) nelayan pemilik, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan, baik yang langsung turun ke laut maupun yang menyewakan pada orang lain, dan 2) nelayan buruh, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat tangkap ikan tetapi mereka bekerja pada orang lain yang memiliki alat tangkap ikan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan tangkap adalah keterbatasan teknologi penangkapan ikan. Produksi hasil tangkap nelayan masih rendah karena masih menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor berkapasitas kecil. Salah satu upaya meningkatkan hasil tangkap dengan mengganti perahu motor tempel dan perahu tanpa motor menjadi kapal motor yang lebih besar. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan, salah satu hal penting untuk diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas nelayan (Dillon, 2012). Pemberdayaan tenaga kerja khususnya bagi para nelayan meliputi lima variabel pokok. *Pertama*, kapasitas nelayan yang meliputi kepemilikan alat tangkap utama (perahu). *Kedua*, sosial kemasyarakatan berupa pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan nelayan. *Ketiga*, inovasi lokal berupa pengembangan teknologi. *Keempat*, pengembangan iklim usaha yang memungkinkan perluasan jaringan dan kepastian pemasaran. *Kelima*, berkembangnya keberdayaan nelayan dalam melakukan kerjasama global (Harfina, 2013).

Penguatan kapasitas nelayan akan lebih cepat terlaksana apabila terjadi hubungan antara beberapa pihak pemangku kepentingan yang tertarik dengan kegiatan perikanan dan peningkatan kehidupan nelayan. Namun kenyataannya, kerjasama dan kemitraan antar kelompok nelayan dengan pihak lain, yaitu pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mengelola ikan masih terbatas. Penting adanya pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan bersifat komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir mulai dari produksi sampai pemasaran.

Dalam pengembangan usaha kecil di setor perikanan tangkap di Indonesia, terdapat beberapa pola atau bentuk kemitraan antara usaha kecil dengan pengusaha besar, yang dapat digolongkan sebagai berikut (Arifin Z, 2009):

1. Pola kemitraan inti-plasma. Pada pola ini umumnya merupakan hubungan antara petani, kelompok tani/nelayan sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan kelompok mitra berkewajiban memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

2. Pola Kemitraan subkontrak. Pola ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan dengan kelompok mitra yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pada pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, ketrampilan, dan produktivitas.
3. Pola Kemitraan dagang umum. Pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Dalam pola ini pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu. Penerapan pola banyak dijumpai pada kegiatan agribisnis hortikultura, dimana kelompok tani hortikultura bergabung dalam bentuk koperasi kemudian bermitra dengan swalayan atau supermarket. Pihak kelompok tani berkewajiban memasok barang-barang dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati bersama.
4. Pola kemitraan kerjasama operasional. Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Umumnya kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya. Terkadang perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Pola ini sering diterapkan pada usaha perkebunan tebu, tembakau, sayuran dan pertambakan. Dalam pola ini telah diatur tentang kesepakatan pembagian hasil dan resiko.

Kemitraan sektor perikanan tangkap merupakan pola kemitraan kerjasama operasional, yaitu nelayan yang menyediakan tenaga kerja dengan juragan sebagai pemilik modal menyediakan kapal dan biaya melaut atau lebih dikenal dengan hubungan patron-klient. Namun dalam prakteknya hubungan kerjasama berjalan tidak seimbang karena nelayan sangat tergantung pada juragan yang memiliki modal dan alat tangkap. Nelayan terikat dengan juragan karena 'pinjaman uang' sekaligus sebagai perjanjian kerjasama tidak tertulis antara nelayan dengan juragan, seperti yang terjadi pada nelayan Tegal (Asiati, dkk, 2010). Kondisi ini menyebabkan nelayan akan selalu terikat dengan juragan karena tidak mampu untuk membayar hutang yang semakin besar. Pinjaman uang pada nelayan merupakan salah satu

cara untuk menjaga hubungan kerja antara juragan dengan nelayan tidak terputus. Pembagian hasil yang tidak memihak pada nelayan karena nelayan menerima hasil yang lebih kecil dibandingkan nelayan. Begitu juga harga ikan yang dijual ke *supplier* sekaligus juragan, lebih rendah dari harga pasar. Hal ini menyebabkan nelayan semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

FAKTOR YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN

Terdapat banyak faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan. Dilihat menurut kekuatan pengaruhnya, keberhasilan program kemitraan dan pemberdayaan dapat dilihat pada kondisi aspek internal maupun eksternal (Dillon, 2012:12). Aspek internal menyangkut institusi pelaksana kegiatan yang meliputi pemerintah, pelaku usaha, dan pihak swasta. Sementara aspek eksternal meliputi kelengkapan infrastruktur pendukung dan daya dukung potensi usaha yang tersedia. Berikut uraian kondisi kedua faktor berpengaruh berdasarkan studi kasus yang dilakukan di dua lokasi penelitian yakni di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap.

- **Faktor Internal: Peran Pemerintah, Kelompok Nelayan, dan Dunia Usaha**

Sinergi antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan nelayan. Idealnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memiliki kemampuan penganggaran diharapkan dapat memfasilitasi berbagai program kemitraan dan pemberdayaan dengan melibatkan kelompok nelayan dan dunia usaha. Pelaksanaan program juga seharusnya dintegrasikan bersama program lainnya dari dinas-dinas teknis terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kelompok/individu penerima program.

Bagi kelompok nelayan, sebagai objek dan subjek pelaksanaan program, dituntut profesionalisme organisasi yang memungkinkan nelayan mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan menentukan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi. Dalam konsep kemitraan dan pemberdayaan yang ideal, kelompok nelayan seyogyanya mampu menawarkan program-program pemberdayaan yang benar-benar mereka butuhkan dan mampu mengangkat kemandirian, bukan hanya sekedar menerima program yang diberikan oleh pemerintah

maupun dunia usaha. Untuk mencapai hal tersebut, maka prasyarat menciptakan kelompok nelayan yang tangguh dan professional harus diprioritaskan sebelum pelaksanaan program pembedayaan benar-benar diimplementasikan.

Sementara bagi kelompok dunia usaha, posisi mereka memiliki peran strategis sebagai penghubung rantai pemasaran, pengolahan produk lanjutan, serta transfer pengetahuan dan informasi terkait pengembangan industri perikanan tangkap. Melalui kapasitas permodalan yang dimiliki, seharusnya dunia usaha mampu dan mau menggandeng kelompok nelayan dan pemerintah untuk bersama mengembangkan usaha. Hal tersebut menjadi penting, karena dunia usaha juga tidak mungkin berkembang tanpa adanya dukungan dari nelayan dan juga pemerintah. Intinya, ketiganya memiliki kepentingan dan peran yang tidak dapat digantikan. Maka dari itu, sinergi ketiga pemangku kepentingan ini melalui peran dan prasyarat keberadaannya menjadi penting ketika bicara tentang keberhasilan program kemitraan dan pemberdayaan khususnya bagi kelompok nelayan.

Pembelajaran dari program kemitraan dan pemberdayaan kelompok nelayan yang selama ini dijalankan di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa sinergi antar kelembagaan yang dimaksud kurang berjalan optimal. Inisiatif program biasanya selalu berasal dari pemerintah daerah (dinas teknis), sementara kelompok nelayan dan dunia usaha umumnya hanya menunggu pelaksanaan program. Walaupun ada inisiatif kemitraan dari dunia usaha, biasanya merupakan bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang peruntukannya tidak khusus untuk menjamin keberlangsungan kegiatan kenelayanan. Selain itu, antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha masih terkonsentrasi pada penyelesaian masalah yang masing-masing mereka hadapi. Pemerintah daerah misalnya dihadapkan pada keterbatasan anggaran pemberdayaan yang selanjutnya menuntut keharusan kemampuan pelaksanaan program yang benar-benar efektif dan berkesinambungan. Walaupun terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, masih sangat terbatas pada kegiatan skala kecil baik dari aspek kepesertaan maupun dampak yang ditimbulkan. Keterbatasan anggaran juga mengakibatkan proses pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program tidak berjalan efektif sehingga keberlanjutan program seringkali dipertanyakan.

Pada sisi kelompok nelayan, masih belum mampu berkembang lebih baik mengingat pengalaman membangun organisasi yang masih minim dan

kualitas SDM yang rendah. Apalagi ditambah dengan karakter nelayan di kedua daerah tersebut yang lebih terbiasa bekerja secara individu sehingga membutuhkan proses penyesuaian untuk bisa bekerja bersama dalam sebuah kelompok nelayan. Masalah kemiskinan nelayan juga masih menjadi isu krusial dan penanganannya perlu intervensi multisektor. Sementara di kalangan dunia usaha, kerjasama yang dikembangkan masih sangat minim. Padahal potensi pengembangan usaha kenelayanan, terutama industri pengolahan hasil laut, di kedua daerah tersebut memiliki potensi yang cukup besar.

• **Faktor Eksternal: Daya Dukung Ekonomi Daerah**

Daya dukung ekonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha perikanan baik yang bersifat *backward* maupun *inward linkages*. Suatu daerah yang memiliki kapabilitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri perikanan dipastikan mampu meningkatkan nilai tambah dari produksi perikanan yang dihasilkan. Daya dukung tersebut diantaranya ketersediaan dan kelengkapan pelabuhan kapal ikan, tempat pelelangan ikan, pasar ikan, dan usaha pengolahan hasil ikan (produk turunan). Keberadaan daya dukung sarana dan prasarana tersebut diakui akan berdampak positif terhadap meningkatnya kesempatan nelayan untuk mengoptimalkan usaha melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

Sementara itu, ketersediaan industri pengolahan hasil ikan ditengarai telah memberikan efek berantai terhadap memungkinkannya pengembangan usaha perikanan di suatu daerah. Hal tersebut karena keberadaannya dapat menghidupkan kegiatan ekonomi sektor lainnya, terutama sektor perdagangan dan pengolahan bahan makanan. Keberadaan industri pengolahan ikan juga dapat berkontribusi positif terhadap meningkatnya jumlah kunjungan dan kegiatan pariwisata pesisir di suatu daerah. Artinya, pengembangan industri hilir perikanan tangkap memungkinkan adanya efek berganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap terkait pengembangan industri pengolahan hasil laut di kedua daerah tersebut dapat dikatakan masih belum berkembang optimal. Umumnya nelayan di kedua daerah tersebut berperan sebatas penyedia bahan baku ikan yang pengolahannya dilakukan di daerah lain. Dengan kondisi seperti itu, maka nilai tambah ekonomi yang lebih besar tidak menjadi keuntungan kedua daerah tersebut. Belum lagi jika dikaitkan

dengan berbagai *multiplier effect* yang ditimbulkan. Hal tersebut diperparah dengan minimnya daya dukung sarana dan prasarana kegiatan kenelayanan, seperti kelengkapan pelabuhan ikan dan pasar ikan. Maka tidak mengherankan jika nelayan di kedua lokasi tersebut lebih tertarik untuk menjual hasil tangkapan dalam bentuk ikan segar dan belum tertarik untuk pengolahan yang menghasilkan produk turunan dari hasil olahan ikan laut.

Untuk mendukung peningkatan kegiatan pengolahan hasil perikanan tangkap, kedua daerah tersebut harus mampu meningkatkan ketersediaan akses, baik dari sisi sarana prasarana perikanan maupun dukungan kebijakan yang dapat mengangkat produk hasil perikanan tangkap. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan usaha kecil mikro terkait pengolahan hasil perikanan tangkap yang melibatkan kelompok nelayan dan mitra usaha perdagangan, termasuk juga koperasi dan kelembagaan ekonomi lainnya di daerah. Jika hal ini dapat dilakukan maka aktivitas ekonomi perikanan tangkap di kedua daerah tersebut tidak hanya berasal dari hasil tangkapan nelayan, tetapi juga akan merambah pada sektor perdagangan yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor perikanan yang lebih bervariasi.

KEMITRAAN DAN STRATEGI KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP: CATATAN REKOMENDASI

Uraian di bawah ini menjelaskan beberapa usulan strategi yang dapat ditempuh dalam kerangka pengembangan kemitraan dan pemberdayaan yang melibatkan pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan. Terdapat empat aspek yang dijadikan dasar dalam penentuan strategi pengembangan kemitraan dan pemberdayaan yakni (1) strategi peningkatan kelengkapan peralatan tangkap; (2) strategi penguatan dan peningkatan akses permodalan; (3) strategi peningkatan promosi dan pemasaran hasil perikanan tangkap; (4) strategi pengolahan pasca produksi; dan (5) strategi penguatan kelembagaan nelayan (kelompok nelayan).

• Kelengkapan Peralatan Tangkap

Kelengkapan peralatan tangkap merupakan bagian terpenting untuk mendukung kegiatan kenelayanan. Keberadaannya dapat menentukan hasil tangkapan nelayan karena semakin lengkap berarti ada kemungkinan hasil tangkapan juga semakin baik. Salah satu kelengkapan peralatan tangkap yang sangat penting bagi nelayan adalah kepemilikan perahu/kapal dan jaring ikan.

Pembelajaran dari berbagai program pemberian bantuan peralatan tangkap yang selama ini dijalankan pemerintah adalah tidak semua nelayan membutuhkan kapal/perahu dan jaring ikan dengan kemampuan besar. Pemberian kapal/perahu, misalnya, perlu disesuaikan dengan keinginan, kemampuan dan karakteristik wilayah perairan tempat dimana nelayan biasanya menangkap ikan. Program serupa, seperti yang pernah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tegal, dapat menjadi pembelajaran yang baik, bagaimana program pemberian perahu/kapal dari pemerintah daerah setempat berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan Kota Tegal. Dalam pelaksanaan program tersebut kelompok nelayan dilibatkan dari awal untuk menentukan desain kapal, pengawasan pengerjaannya, penentuan siapa yang akan menerima, kecocokan jenis jaring, hingga penguasaan keterampilan perawatan perahu. Pemahaman terhadap alat tangkap yang ramah lingkungan juga penting untuk terus disebarluaskan kepada nelayan. Kelengkapan alat tangkap menjadi tidak ada artinya jika nelayan tetap menggunakan alat tangkap yang merusak. Jika sumber mata pencaharian nelayan di laut terganggu artinya keberlanjutan kegiatan kenelayanan di masa depan juga akan sulit dikembangkan.

• Penguatan Permodalan

Masalah kemampuan dan kebutuhan permodalan menjadi identik menimpa banyak nelayan kecil di Indonesia. Kemiskinan dan sulitnya akses permodalan dari lembaga keuangan modern (terutama perbankan) menyebabkan banyak nelayan terjatuh dan sangat tergantung pada kelembagaan permodalan tradisional seperti rentenir, juragan, dan pelepas uang. Bahkan, pada banyak kasus, nelayan kecil juga sangat tergantung pada pemodal tradisional untuk urusan pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga. Padahal untuk mendapatkan pinjaman modal dari kelembagaan tradisional tersebut, nelayan harus membayarnya dengan tingkat bunga pinjaman yang tinggi. Dampaknya, nelayan kecil menjadi sangat terikat kepada pemodal tradisional dan terus terjatuh kemiskinan.

Selama ini telah banyak program terkait penguatan permodalan nelayan, khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan program tersebut adalah memutus ketergantungan mata rantai nelayan kepada pemodal tradisional. Melalui berbagai program yang ada, pemerintah berupaya memberikan fasilitas kredit lunak bagi nelayan yang pengembaliannya dapat diatur sesuai kemampuan nelayan. Namun tidak

jarang program tersebut tidak terjangkau oleh nelayan kecil karena kendala administratif dan kemampuan keuangan nelayan yang tidak mendukung.

Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap terkait penguatan permodalan nelayan adalah perlu adanya mekanisme pemberian kredit permodalan yang melibatkan kelompok nelayan. Strateginya dapat dilakukan melalui pemberian dana bergulir kepada anggota kelompok nelayan yang pemanfaatannya diberikan untuk mendukung pembelian peralatan tangkap dan operasional kenelayanan. Pemberian dana bergulir tersebut dimaksudkan sebagai stimulus kemudahan akses permodalan bagi nelayan kecil yang selama ini sulit terjangkau akses permodalan lembaga perbankan. Pemberian bantuan permodalan kepada kelompok nelayan dapat dikatakan lebih aman dan berhasil dibanding jika bantuan permodalan diberikan langsung kepada individu nelayan. Apalagi jika permodalan tersebut berasal dari pemerintah yang umumnya dianggap sebagai bantuan oleh nelayan.

Mekanisme penyaluran dana bergulir disesuaikan dengan kemampuan kelompok nelayan dan dilakukan bersamaan dengan penguatan kelompok nelayan, khususnya terkait pengelolaan keuangan. Selain itu, pendampingan dan pengawasan penyaluran dana bergulir juga perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam hal ini, pengawasan dan pendampingan dari dinas terkait menjadi sangat penting agar ada jaminan keberlanjutan dan komunikasi yang efektif antara pemberi bantuan permodalan dengan kelompok nelayan. Strategi lain yang perlu dipertimbangkan adalah pemberian insentif tambahan dana bergulir bagi kelompok nelayan yang berhasil meningkatkan kemampuan permodalan dan pinjaman kepada anggotanya. Strategi ini diyakini dapat memicu setiap kelompok nelayan, khususnya pengurus kelompok, untuk mengoptimalkan dana bergulir yang mereka terima.

• **Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap**

Pemasaran dalam kegiatan perikanan tangkap berkaitan erat dengan ketersediaan tempat pelelangan dan pasar ikan. Bagi nelayan dengan kemampuan modal dan peralatan tangkap yang besar, tempat pelelangan ikan merupakan pilihan utama untuk memasarkan hasil tangkapan. Mereka umumnya tidak memiliki kesulitan dalam pemasaran hasil tangkapan. Selain memiliki kemudahan akses pemanfaatan pelelangan ikan, mereka biasanya juga telah memiliki rekanan pemasaran hasil tangkapan khususnya di industry pengolahan ikan.

Para nelayan besar ini umumnya menggunakan kapal motor di atas 35 GT dibantu banyak Anak Buah Kapal (ABK) untuk mencari ikan selama 1-2 minggu. Modal operasional penangkapan ikannya pun tidak sedikit, karena setiap kali melaut dibutuhkan modal puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Maka tidak mengherankan jika hasil ikan tangkapannya pun dalam jumlah besar dan membutuhkan pelelangan ikan sebagai tempat pemasaran yang cepat dan efisien.

Para pembeli di pelelangan ikan adalah para pedagang dan pemasok kebutuhan industri. Untuk menjadi pembeli di pelelangan ikan juga tidaklah mudah, karena biasanya mensyaratkan adanya jaminan sejumlah uang sebagai bagian dari sistem pelelangan. Di banyak daerah di Indonesia, tempat pelelangan ikan biasanya dikelola oleh sebuah unit khusus di bawah dinas terkait. Namun demikian ada juga di daerah tertentu dimana pengelolaan pelelangan ikan dilakukan oleh organisasi kenelayanan setempat.

Sementara bagi nelayan kecil, mengikuti sistem pelelangan tampaknya tidak memungkinkan. Umumnya hasil tangkapan nelayan kecil jumlahnya sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jarak wilayah tangkap dan waktu penangkapan. Biasanya, wilayah tangkapan nelayan kecil berada di sekitar perairan lepas pantai dan waktu tangkap yang tidak lebih 5 jam per hari. Mereka bekerja secara individu dan hasil tangkapan (jenis ikan) sangat bervariasi baik dari berat dan ukuran ikan. Dengan keadaan seperti ini, maka tempat yang memungkinkan untuk menjual hasil tangkapan ikan nelayan kecil adalah di pasar ikan.

Tempat pelelangan ikan, sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh nelayan kecil. Namun pengelolaannya seharusnya dibedakan dengan nelayan besar. Pembelajaran di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap, pemerintah daerah setempat memiliki pengelolaan pelelangan ikan yang berbeda antara nelayan kecil dan besar. Tujuan utamanya memberikan kepastian pasar bagi nelayan kecil dan besar serta kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh hasil tangkapan ikan.

Untuk mendukung pemasaran hasil tangkapan bagi nelayan kecil, keberadaan pasar ikan menjadi sangat penting. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan khusus terutama bagi daerah yang banyak masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjamin adanya kelangsungan pemeliharaan dan ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Untuk mendukung pengembangan kelembagaan ekonomi nelayan,

pemerintah juga dapat bekerjasama dengan kelembagaan nelayan (koperasi nelayan) dan pihak swasta dalam pengembangan pasar ikan. Dalam hal ini keberadaan pasar ikan tidak hanya sebagai tempat jual beli ikan, tetapi diharapkan dapat juga menjadi pusat pertukaran informasi dan pemberdayaan nelayan.

- **Pengolahan Pasca Produksi**

Pengolahan pasca produksi hasil perikanan ditujukan untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil perikanan tangkap. Untuk mewujudkan hal tersebut, hasil produksi perikanan seharusnya tidak berhenti pada penjualan ikan segar, tetapi diolah menjadi berbagai produk turunan khususnya makanan berbahan baku ikan.

Selama ini, keterlibatan nelayan khususnya nelayan kecil dalam pengolahan hasil ikan masih sangat minim. Nelayan kecil masih terpaku pada penjualan dalam bentuk ikan segar. Padahal pengolahan hasil tangkapan menjadi produk turunan berbahan ikan dapat menjadi peluang peningkatan pendapatan bagi nelayan. Apalagi peluang pasar untuk produk pengolahan hasil ikan masih sangat terbuka luas.

Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap ditemukan bahwa diantara penyebab minimnya minat nelayan untuk merambah usaha pada pengolahan hasil tangkapan adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan yang dimiliki. Keterbatasan permodalan (khususnya peralatan pengolahan) juga menjadi kendala terbesar dalam mendukung pengolahan hasil ikan bagi nelayan. Selain itu, kebiasaan (budaya) nelayan yang ingin mendapatkan hasil *instant* (cepat) karena desakan kebutuhan juga dapat diduga menjadi penyebab rendahnya minat nelayan untuk mengolah hasil tangkapan.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan minat nelayan untuk mengolah ikan hasil tangkapan ke bentuk produk yang bernilai tinggi adalah dengan mengikutsertakan ibu rumah tangga (istri nelayan) sebagai pelaku utama kegiatan tersebut. Penekanan terhadap peran ibu rumah tangga nelayan menjadi penting karena biasanya dalam keluarga nelayan terdapat garis pembagian kerja yang jelas. Dalam keluarga nelayan, suami biasanya berperan sebagai pencari ikan, sedangkan istri bertanggung jawab terhadap penjualan hasil ikan.

Pada tahap awal, pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan dapat dilakukan melalui kegiatan praktik pengolahan ikan menjadi berbagai bahan pangan, seperti nugget, sosis, kerupuk ikan, dan berbagai

produk makanan lainnya. Kegiatan tersebut juga perlu dibarengi dengan penguatan minat usaha dan pengetahuan terkait manajemen keuangan agar muncul inisiatif dari diri keluarga nelayan untuk tertarik dalam pengembangan usaha pengolahan hasil ikan. Selanjutnya, pemerintah dan dunia usaha sebagai mitra nelayan dapat berkontribusi sebagai pendamping dan membuka peluang pemasaran produk yang dihasilkan. Kegiatan ini juga seharusnya diintegrasikan dengan program bantuan permodalan bagi kelompok nelayan sehingga permasalahan akibat keterbatasan akses permodalan dapat teratasi dalam satu lingkup program yang saling melengkapi dengan sasaran kelompok dan keluarga nelayan.

- **Penguatan Kelompok Nelayan**

Penguatan kelembagaan nelayan menjadi sangat penting terutama terkait pelaksanaan berbagai strategi yang telah dijelaskan di atas. Apalagi selama ini sasaran berbagai program kemitraan dan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan selalu berbasis pada kelompok. Tujuannya adalah agar pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan program dapat berkelanjutan. Untuk mendukung penguatan kelembagaan nelayan, maka diperlukan berbagai strategi yang tujuannya adalah: (1) Pembentukan kelompok nelayan yang pembinaannya langsung dibawah dinas terkait; (2). Pemberdayaan SDM nelayan melalui penguatan kelompok nelayan; (3). Penguatan kelompok nelayan melalui peran koperasi nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota; (4) Peningkatan pelibatan aspirasi dan partisipasi kelompok nelayan dalam perencanaan program pemerintah terkait pemberdayaan nelayan; dan (5) Penguatan managerial keorganisasian kelompok nelayan, khususnya bagi pengurus kelompok.

Implementasi dari berbagai strategi tersebut diharapkan dapat mendukung: (1) Penguatan peran kelompok nelayan melalui revitalisasi organisasi; (2) Peningkatan akses dan partisipasi kelompok nelayan dalam penentuan kegiatan/program terkait kenelayanan; (3) Peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan pendampingan berbagai program pemberdayaan yang melibatkan kegiatan kelompok nelayan; (4) Peningkatan peran kelembagaan nelayan dalam penyelesaian konflik yang seringkali terdiantar nelayan karena perebutan wilayah tangkapan; dan (5) Memperluas jaringan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan dalam pengembangan industri pengolahan hasil ikan.

Secara ringkas, penjelasan terkait strategi kemitraan dan pemberdayaan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan masyarakat nelayan dengan melibatkan ketiga unsur yakni pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan dapat dilihat pada matrik berikut ini:

Strategi Kemitraan dan Pemberdayaan Untuk Menjamin Kelangsungan Pekerjaan Masyarakat Nelayan: Kasus di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap

Aspek Kegiatan	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
a. Kelengkapan Peralatan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan alat produksi penangkapan ikan yang lebih memadai dan menunjang keberlangsungan pekerjaan sebagai nelayan. • Meningkatkan jumlah produksi/hasil tangkapan. • Strategi pelibatan aspirasi kelompok nelayan dalam menentukan jenis dan desain kapal sesuai kapasitas dan kebutuhan nelayan lokal. • Strategi partisipasi kelompok nelayan dalam proses pengawasan dan penyelesaian pembuatan kapal sesuai desain yang diinginkan. • Ketersediaan alat dan armada tangkap (khususnya ketersediaan bahan bakar minyak) yang sangat penting untuk mendukung pengembangan usaha perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas tangkapan khususnya bagi nelayan kecil. • Menguatnya kelompok nelayan dalam mengelola program pemberian alat tangkap khususnya yang berasal dari pemerintah. • Meningkatnya jumlah bantuan peralatan tangkap yang sesuai dengan kebutuhan nelayan. • Meningkatnya kesadaran nelayan terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. • Memberikan insentif kredit atau bantuan program bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. • Meningkatnya peran kelembagaan nelayan dalam penyelesaian konflik kenelayanan. • Kemudahan persyaratan yang ringan bagi nelayan kecil dalam memanfaatkan fasilitas koperasi nelayan.
b. Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian tambahan modal dalam memperlancar kegiatan kenelayanan melalui mekanisme pemberian dana bergulir yang pengelolaannya melibatkan kelompok nelayan • Pemberian bantuan modal bersifat stimulus sehingga dapat mengurangi dan memutus ketergantungan nelayan kecil pada tengkulak/juragan -walaupun dalam prakteknya masih sulit dihapuskan. • Pembelajaran nelayan untuk bekerja secara kelompok (berorganisasi): merencanakan, menjalankan, dan mengawasi program yang telah disepakati secara kelompok. • Pengawasan dan pendampingan pengelolaan permodalan untuk menjamin keberlangsungan program yang dilakukan. • Pemberian insentif tambahan permodalan bagi kelompok nelayan yang berhasil mengelola dana bergulir dengan baik (tingkat pengembalian yang tinggi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah dan cakupan bantuan dana bergulir bagi nelayan. • Meluasnya pemberian fasilitas kredit bagi nelayan dengan persyaratan peminjaman dan pengembalian yang disesuaikan (pro nelayan). • Meningkatnya pemberian program dana bergulir untuk pemilikan armada kapal yang lebih layak bagi nelayan kecil. • Menguatnya evaluasi dan pengawasan terhadap sistem pinjaman modal melalui pendampingan dari unsur lain di luar pemerintah (LSM). • Meluasnya pengelolaan usaha tambahan di luar kegiatan utama kenelayanan, khususnya bagi ibu rumah tangga nelayan melalui pengolahan pasca produksi (pengolahan produk makanan berbahan ikan). • Meningkatnya profesionalitas kelompok nelayan dalam mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah, dunia usaha, serta kelompok nelayan.

-
- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| c. Pemasaran | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI) yang layak bagi nelayan besar dan kecil. • Pembangunan pasar ikan yang pengelolaannya melibatkan peran pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan. • Keikutsertaan kelompok nelayan dalam berbagai kegiatan pameran berbahan baku ikan sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan permintaan produk olahan ikan. • Perda hari tertentu dalam seminggu menu makan berbahan baku ikan (contoh: perda Pemda Kota Depok). | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyediaan fasilitas/prasarana yang mendukung pengembangan daerah pesisir yang identik sebagai pusat kuliner produk olahan ikan dan sentra pasar ikan (terutama untuk kebutuhan pemasaran nelayan kecil, pedagang ikan, dan masyarakat pembeli ikan). Meningkatnya kerjasama pemasaran antara produsen produk makanan berbahan baku ikan dengan pelaku usaha ekonomi (misalnya: supermarket, toko oleh-oleh/suvenir, waralaba, hotel, restoran). • Sosialisasi gerakan dan penyadaran konsumsi produk ikan untuk peningkatan gizi masyarakat. |
| d. Pengelolaan pasca produksi | <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengolahan ikan menjadi makanan yang berbahan baku ikan melibatkan kelompok ibu ruma tangga nelayan dan pelaku usaha di daerah. • Pemanfaatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) – Kelompok Pengolah untuk mempermudah pengolahan dan pemasaran produk hasil olahan ikan. • Bantuan modal dan peralatan pengolahan produk berbahan baku ikan. | <ul style="list-style-type: none"> • Memperluas sasaran pembinaan pelatihan pada keluarga nelayan. • Meningkatnya kualitas (penggunaan teknologi tepat guna) produk makanan berbahan baku ikan yang dihasilkan oleh istri-nelayan. • Menguatnya pendampingan untuk peningkatan hasil dan kualitas produk yang dihasilkan. • Tumbuhnya peningkatan minat masyarakat nelayan untuk mengembangkan usaha di luar mata pencaharian utama sebagai nelayan (alternatif usaha) |
| e. Penguatan kelompok nelayan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelompok nelayan yang pembinaannya langsung dibawah dinas terkait. • Pemberdayaan SDM nelayan melalui penguatan kelompok nelayan terutama terkait pengelolaan manajemen keuangan dan pengembangan usaha diluar kegiatan kenelayanan. • Penguatan kelompok nelayan melalui peningkatan peran koperasi nelayan • Peningkatan pelibatan aspirasi dan partisipasi kelompok nelayan dalam perencanaan program pemerintah terkait pemberdayaan nelayan. • Penguatan managerial keorganisasian kelompok nelayan, khususnya bagi pengurus kelompok nelayan. • Penciptaan alternatif mata pencaharian di luar sektor kenelayanan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akses dan paritispasi kelompok nelayan dalam penentuan kegiatan/program terkait kenelayanan. • Menguatnya peran kelompok nelayan melalui revitalisasi organisasi dan kapabilitas pengurus kelompok nelayan. • Meningkatnya peran pemerintah dan lembaga lokal dalam monitoring dan pendampingan kegiatan kelompok nelayan. • Meningkatnya peran kelompok nelayan dalam penyelesaian konflik antar nelayan yang biasanya dipicu akibat perebutan wilayah tangkapan dan penggunaan alat tangkap yang merusak (pukat). • Berkembangnya unit usaha kelompok nelayan diluar kegiatan utama kenelayanan • Meningkatnya peran serta ibu rumah tangga nelayan dalam peningkatan sumber pendapatan keluarga nelayan. |
-

KESIMPULAN

Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Selain meningkatkan pendapatan, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial penduduk yang lebih luas. Di samping itu, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan nelayan sangat diperlukan untuk mengurangi kemiskinan nelayan, melepas ketergantungan nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional, dan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tanpa adanya sinergi pelibatan pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan, maka upaya pengembangan kemitraan dan pemberdayaan nelayan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan di sektor perikanan tangkap tidak akan berhasil dengan baik. Untuk mewujudkannya, diperlukan strategi yang komprehensif dan terpadu yang mencakup berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dengan mempertimbangkan keberadaan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi daya dukung masing-masing pihak yakni pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan untuk berkontribusi sesuai dengan peran, fungsi dan kapabilitasnya. Sementara keberadaan faktor eksternal berkaitan dengan sejauh mana komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pengembangan usaha terkait pengolahan hasil perikanan tangkap.

Tulisan ini semakin menegaskan bahwa pengembangan kemitraan dan pemberdayaan nelayan dapat dilakukan jika terdapat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok nelayan. Pembelajaran yang ditemukan dari studi kasus di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap adalah perlunya membangun dan meningkatkan kapabilitas dan kepengurusan kelompok nelayan di tingkat lokal. Upaya ini penting dilakukan terutama dalam tahap awal pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan bagi nelayan khususnya bagi nelayan kecil mengingat banyaknya hambatan dan keterbatasan individu nelayan kecil ketika mereka harus bekerja dalam sebuah kelompok. Membangun komunikasi yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan juga perlu dijadikan prioritas. Pada kasus nelayan di Kota Tegal ditemukan bahwa keberhasilan dalam program bantuan alat tangkap terjadi karena adanya upaya

pelibatan kelompok nelayan sejak awal mendesain kapal, pengerjaan hingga pembagiannya ke sejumlah kelompok nelayan. Kelompok yang mendapatkan bantuan alat tangkap juga diberikan ketrampilan perawatan sehingga alat tangkap yang diberikan bermanfaat dalam jangka panjang. Untuk menjamin keberlanjutan, program pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan juga sangat diperlukan terutama dari pemerintah daerah dan melibatkan unsur kelompok nelayan dan aparat pemerintahan di tingkat desa. Selanjutnya, diperlukan strategi kebijakan dan program yang sarannya mencakup pencapaian kemandirian kelompok nelayan di bidang peningkatan kepemilikan peralatan tangkap, permodalan usaha, pemasaran hasil, dan pengolahan hasil produksi. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiati, Devi dkk. 2010. *Kemitraan Antara Tenaga Kerja, Dunia Usaha dan Pemerintah Untuk Kelangsungan Pekerjaan*, Laporan Penelitian, PPK-LIPI
- Asiati, Devi dan Laila Nagib. 2011. *Program Coremap di Desa Mapur Kabupaten Kepulauan Riau, Manfaat dan Perubahan Pendapat Masyarakat*, Indonesia Pintar Publishing, 2011.
- Arifin, Zainal., 2009, *Alternatif Pola Kemitraan untuk Usaha Perikanan*. (<http://web.ipb.ac.id/~psp/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=339>). Diakses pada tanggal : 23 Maret 2013
- Dillon, H.S. 2012. *An Indonesian Renaissance : Sebuah Konsep Pemikiran*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Darwin, 2003. *Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah*. LIPI Press: Jakarta
- FAO, 2005, *Increasing the Contribution of Small Scale Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security*. Food and Agriculture Organization of United Nation.
- FAO, 2005, *Increasing the Contribution of Small Scale Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security*, Food and Agriculture Organization of United Nation.
- Harfina, dkk. 2012. *Pemberdayaan, Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Pertanian*. Laporan Penelitian. Jakarta : PPK LIPI

- Hadi, A. Purbathun. Tanpa Tahun. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan*. <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013
- Kusnadi, 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*, Penerbit Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan: Bantul.
- Kamil, Mustofa. 2006, *Strategi Kemitraan Dalam Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Departemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti dan Pengembangan: Bandung
- Kertasasmita, G. 1996. *Kemitraan Dalam Pembangunan Nasional dengan Tinjauan Khusus Dalam Pembangunan Perkotaan*, Makalah pada Seminar Nasional Urban dan Regional Development Institute (URDI, Jakarta, 23 September 1996).
- KKP. 2012. *Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia Tahun 2012*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Jakarta.
- Longwe, Hlupekile Sara. 1999. The Women's Empowerment (Longwe) Framework, dalam *A Guide to Gender-Analysis Framework* oleh Candida & Ines Smith, Oxford: An Oxfam Publication.
- Lopulalan, Yoisy. 2010. *Analisis Dampak Kemitraan Perikanan Tangkap Terhadap Kondisi Ekonomi Wilayah*. Jurnal "Amanisal" SP FPIK Unpatti-Ambon. Vol. 1. No.1, Mei 2010. Hal 56 – 66.
- Manahan, Juari. 2009. *Pengantar Kebijakan Publik*. Penerbit Quality: Jogyakarta
- Nawawi. 2008. *Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia: Ukuran dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh, dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia: diantara Peluang dan Tantangan*, Prijono Tjiptoheriyanti dan LAila Nagib (Ed), LIPI Press: Jakarta
- Nawawi. 2013. *Optimalisasi Peran Kelembagaan Kemitraan Pertanian Tanaman Pangan dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh: Kasus Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, dalam "Dinamika Kemitraan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perdesaan", Laporan Penelitian, PPK-LIPI
- Sukada, dkk. 2007. *CSR for Better Life: Indonesian Context Membumikan Bisnis Berkelanjutan Memahami Konsep dan Praktik Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Jakarta : Indonesia Bisnis Link
- Sipahelut M., 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara*, Thesis, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil. www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../parent/457. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/node/1011/undangundang-nomor-20-tahun-2008>. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008, <http://peraturan.go.id/pp/nomor-17-tahun-2013-11e44c4ea98b2b80882e313231353436.html>. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/316/node/677/pp-no-44-tahun-1997-kemitraan>. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.